BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sebuah komoditas ekonomi baru yang mulai dikembangkan kembali di Indonesia sejak tahun 2009, dimana tahun tersebut menjadi titik balik kampanye pariwisata Indonesia dengan mengusung tema Kebangkitan Nasional dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada masa menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Desember 2022 mencapai 895,12 ribu kunjungan, naik 47,08 persen jika dibandingkan pada kondisi Desember 2021. Provinsi yang memiliki jumlah wisatawan tertinggi pada tahun 2022 ialah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY merilis data terbaru yang menyebutkan pariwisata Provinsi DIY juga mengalami kenaikan kunjungan wisatawan. Data yang tercatat sampai Maret 2023 sebanyak 19,2 juta orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 7,5 juta orang.

Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 pasal 4 menyebutkan bahwa pariwisata di Indonesia bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan penduduk; mengatasi masalah pengangguran; menjaga kelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya; dan mengembangkan kebudayaan. Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, menjelaskan

bahwa pemerintah mengembangkan sektor pariwisata salah satunya dalam bentuk desa wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengatasi masalah pengangguran, dan menjaga kawasan alam, lingkungan dan sumber daya.

Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga turut menjelaskan bahwa sampai awal tahun 2023 terdapat 3.788 desa wisata yang tersebar di 38 provinsi, dengan sebaran 2.541 desa wisata kategori rintisan, 960 kategori desa wisata berkembang, 279 kategori desa wisata maju, dan 12 kategori desa wisata mandiri. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (2022) menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki 305 desa wisata.

Pengembangan desa wisata dapat dikatakan baik dan apik apabila dapat menyetarakan pemasukan atau pendapatan warga masyarakat dalam segi perekonomian daerah secara lebih luas sehingga akan berpengaruh untuk penduduk sekitar desa wisata dan pemerintah setempat. Sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan program desa wisata guna memacu pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pembentukan desa wisata tidak dapat diterapkan di seluruh desa dikarenakan harus memuat tiga komponen penting yaitu, data potensi yang dimiliki desa, keinginan dan kesiapan warga masyarakat, dan aturan atau rencana pembangunan (Purnomo, 2022)

Kondisi geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam *website* resmi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan bahwa wilayah Yogyakarta tidak hanya diberi kekayaan keindahan alam, namun

juga kerajinan alami, panorama desa wisata yang indah dan beberapa bangunan *heritage*. Semua ini memberi kesan bahwa Yogyakarta layak menjadi sebuah *the world destination*. Sektor pariwisata provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pesat. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA, 2023) merilis jumlah wisawatan yang berkunjung ke wilayah Provinsi DIY pada tahun 2023 hingga bulan April berjumlah 3.604.788 orang.

Nuryanti (1993) menyatakan bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk penggabungan antara pertunjukan atau atraksi; akomodasi dan fasilitas penunjang yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata jika memiliki sumber daya lokal atau potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan daya tarik pariwisata. Penggalan dan pengembangan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu upaya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan dapat dilakukan melalui pengelolaan pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat dalam peningkatan taraf hidup melalui aktivitas usaha dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan (Blakely & Leigh, 2010). Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam

kesempatan kerja dan usaha, perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran serta keberdayaan jaringan kerja kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Blakely & Leigh, 2016).

Di Indonesia Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dilaksanakan melalui beberapa sektor, salah satunya sektor pariwisata. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang menerapkan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui sektor pariwisata dalam bentuk desa wisata. Desa wisata dapat diwujudkan dengan diperlukannya perencanaan dengan melibatkan ketiga unsur yaitu: pemerintah lokal, masyarakat, dan organisasi lokal. Perencanaan dengan mengikutsertakan masyarakat disebut perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif merupakan proses perancangan suatu kegiatan atau hal yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan perantara (Abe, 2008). Perencanaan partisipatif merupakan proses dimana terjalin kerja sama antar *stakeholders* baik pemerintah lokal, organisasi lokal, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya lokal. Desa wisata dapat diwujudkan dengan adanya strategi atau cara untuk mencapai tujuan tertentu dimana masyarakat aktif terlibat.

Wibowo (2009) menjelaskan bahwa hasil penelitian mengenai strategi perencanaan partisipatif di Kecamatan Pernalang diawali dengan proses penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, penetapan langkah-langkah, dan merancang anggaran. Namun, keterlibatan

masyarakat dan pelaku kebijakan secara keseluruhan belum maksimal dilaksanakan sehingga masyarakat perlu pendampingan dalam setiap proses perencanaan partisipatif.

Strategi perencanaan partisipatif juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam wisata edukasi di Desa Jubung Kabupaten Jember (Kamilah, 2022). Masyarakat turut serta menjadi karyawan atau bekerja dalam desa wisata edukasi. Hal tersebut memberikan hasil positif bagi masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan warga desa dari hasil berdagang.

Sejalan dengan penjelasan hasil penelitian terdahulu di atas, Paramanugraha (2022) juga mengemukakan bahwa strategi perencanaan partisipatif yang dilakukan di Kecamatan Medan Labuhan juga menuai keberhasilan. Strategi perencanaan partisipatif yang dilakukan dalam pencegahan wabah *covid* ialah dengan adanya fasilitator yang berperan aktif dalam pelaksanaan program selain itu juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta adanya tingkat partisipasi masyarakat yang bersedia dilibatkan.

Dari penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa strategi perencanaan partisipatif merupakan hal yang penting dalam mempersiapkan kegiatan atau agenda dengan cara atau strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun, dalam mengkaji strategi perencanaan partisipatif, peneliti sebelumnya belum memadukan aspek-aspek pengorganisasian masalah, pembahasan alternatif kegiatan, dan pemilihan kegiatan.

Selain itu juga penelitian sebelumnya belum membahas terkait pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata dalam bentuk desa wisata.

Padahal, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2022) dan Badan Pusat Statistik (2022), sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan mampu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan hingga melaksanakan kegiatan.

Program desa wisata digalakkan untuk mengoptimalkan potensi pedesaan yang dimiliki. Hal tersebut tentunya diperlukan perencanaan secara partisipatif dimana masyarakat ikut dilibatkan dalam merancang atau merencanakan program desa wisata agar berjalan. Salah satu masyarakat sekitar desa wisata yang memiliki keinginan untuk meningkatkan perekonomian melalui desa wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ialah desa wisata Kembangarum. Hal tersebut dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah wisatawan tertinggi pada tahun 2022 sehingga sektor pariwisata mendominasi perekonomian masyarakat.

Jauh sebelum berkembang seperti sekarang, desa wisata Kembangarum termasuk salah satu padukuhan dengan perekonomian terendah atau tertinggal di wilayah Kabupaten Sleman. Warga setempat memiliki keinginan untuk memajukan desa tersebut, langkah pertama dilakukan pendekatan perlahan kepada kelompok masyarakat Kembangarum seperti kumpulan sesepuh, bapak-bapak, PKK, dan karang taruna). Pengelola desa wisata Kembangarum mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam pedesaan (Direktorat Pariwisata, 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat padukuhan Kembangarum memajukan perekonomian melalui desa wisata dengan

strategi perencanaan partisipatif. Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan padukuhan Kembangrum dari wilayah dengan perekonomian terendah kini mampu menjadi desa wisata.

Sesuai dengan uraian di atas, desa wisata Kembangrum menjadi salah satu desa wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu menggerakkan sektor pariwisata daerah. Desa wisata Kembangrum merupakan penamaan yang digunakan karena Kembangrum sendiri ialah padukuhan yang terletak di Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Masyarakat desa wisata Kembangrum mampu meningkatkan perekonomiannya melalui desa wisata dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang dimiliki desa tersebut. Hasil peninjauan awal dapat diketahui bahwa dalam perencanaannya, desa wisata Kembangrum menggunakan pendekatan partisipatif dikarenakan masyarakat ikut terlibat dalam proses pembentukan Kembangrum menjadi desa wisata.

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu dan data yang telah disajikan, maka penelitian terkait strategi perencanaan partisipatif perlu dilakukan dengan adanya kebaruan pada aspek penelitian yang digunakan dan topik yang diteliti. Maka, peneliti melaksanakan penelitian mengenai, “Strategi Perencanaan Partisipatif dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui “Desa Wisata Kembangrum” di *Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman*” untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan partisipatif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata Kembangrum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Perencanaan Partisipatif dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui “Desa Wisata Kembangarum” di *Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?*”, selanjutnya untuk lebih memahami fokus permasalahan penelitian tersebut, maka dijabarkan dalam sub-sub permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengorganisasian masalah terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum?
2. Bagaimana pembahasan alternatif kegiatan terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum?
3. Bagaimana pemilihan kegiatan terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang:

1. Pengorganisasian masalah terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum.
2. Pembahasan alternatif kegiatan terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum.
3. Pemilihan kegiatan terkait Pengembangan Ekonomi Lokal melalui desa wisata Kembangarum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut merupakan penjelasan dari manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya keilmuan atau teori pekerjaan sosial yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai pemikiran tentang tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan partisipatif yang terdiri dari tahapan pengorganisasian masalah, pembahasan alternatif kegiatan, dan pemilihan kegiatan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan perencanaan partisipatif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah tentang perencanaan partisipatif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata Kembangarum.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, meode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang gambaran ringkas hasil penelitian dan saran.